

Daftar Pustaka

Buku

- Bastian, I. (2002). *Privatisasi di Indonesia: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat Patria.
- Boen, H. S. (2008). *Bianglala Business Judgment Rule*. Jakarta: Tatanusa.
- Dahana, T. N. (2024). *Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas pada Perusahaan Grup (Holding) Badan Usaha Milik Negara*. Penerbit NEM.
- Dr. M. Hadi Shubhan. *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, Cet. I, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2008.
- Fuady, M. (2014). *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Johnny, I. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mangun, U., Asiesteus, S., & Varida, N. (2017). *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Studi Hukum dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Mezak, M. H. (2013). *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*. Law Review.
- Miru, A. (2007). *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Miru, A. (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia (Cet. 4)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia (Cet. 4)*. Citra Aditya Bakti.

- Mulhadi. (2021). *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mulhadi. (2021). *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Munir Fuady. (2014). *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nadapdap, B. (2019). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Nadapdap, B. (2019). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Nugroho, S. A., & Sh, M. H. (2018). *Hukum Kepailitan di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Kencana.
- Nugroho, S. A., & Sh, M. H. (2018). *Hukum Kepailitan di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Prasetio, A., & SH, M. (2014). *DILEMA BUMN: Benturan Penerapan Business Judgment Rule (BJR) dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN*. PT. Rayyana Komunikasindo.
- Prasetio, A., & SH, M. (2014). *Dilema BUMN: Benturan Penerapan Business Judgment Rule (BJR) dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN*. Jakarta: PT Rayyana Komunikasindo.
- Prasetya, R. (1995). *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dengan Ulasan Menurut UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas*. Citra Aditya Bakti.
- Prasetya, R. (1995). *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prayoko, R. (2015). *Doktrin Business Judgement Rule: Aplikasinya Dalam Hukum Perusahaan Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Prayoko, R. (2015). *Doktrin Business Judgment Rule: Aplikasinya dalam Hukum Perusahaan Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rajagukguk, E. (2008). *Peranan Hukum dalam Mendorong BUMN Meningkatkan Pendapatan Negara dan Kesejahteraan Rakyat*. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta.
- Satrio, J. (1992). *Perjanjian pada Umumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Sjahdeini, S. R. (2018). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sjawie, H. F., & Sh, L. M. (2017). *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Prenada Media.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2012). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soeria Atmadja, A. P. (2009). *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik dan Kritik* (Ed. 1, Cet. 1). Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeria Atmadja, A. P. (2013). *Transformasi Status Hukum Uang Negara sebagai Teori Keuangan Publik yang Berdimensi Penghormatan terhadap Badan Hukum*. Universitas Indonesia.
- Sulaiman, A. (2023). *Keuangan negara pada Badan Usaha Milik Negara dalam perspektif ilmu hukum*. PT. Alumni, Bandung, hlm. 20.
- Sulaiman, A. (2023). *Keuangan negara pada Badan Usaha Milik Negara dalam perspektif ilmu hukum*. PT. Alumni, Bandung, hlm. 20.
- Supramono, G. (2016). *BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Supramono, G. (2016). *BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Tjandra, W. R., & SH, M. (2023). *Hukum Keuangan Negara: Pengertian, Ruang Lingkup, Pengelolaan, dan Penyelesaian Kerugian Negara*. PT Kanisius.
- Tjandra, W. R., & SH, M. (2023). *Hukum Keuangan Negara: Pengertian, Ruang Lingkup, Pengelolaan, dan Penyelesaian Kerugian Negara*. PT Kanisius.
- Tjandra, W. R., & SH, M. (2023). *Hukum Sarana Pemerintahan*. Prenada Media.
- Tjandra, W. R., & SH, M. (2023). *Hukum Sarana Pemerintahan*. Prenada Media.
- Tumbuan, F. B. (2001). *Tanggung Gugat Direksi Sehubungan Dengan Kepailitan Perseroan Terbatas*. Dalam Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, Dan Benny Ponto (Ed.), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Tumbuan, F. B. (2001). *Tanggung Gugat Direksi Sehubungan Dengan Kepailitan Perseroan Terbatas*. Dalam Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, Dan Benny Ponto (Ed.), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.

Widjaja, G. (2005). *Tanggung jawab direksi atas kepailitan perseroan* (Edisi ke-2). Rajagrafindo Persada.

Widjaja, G. (2005). *Tanggung jawab direksi atas kepailitan perseroan* (Edisi ke-2). Rajagrafindo Persada.

Widjaja, G. (2008). *Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris Pt: Piercing The Corporate Veil: Memberlakukan Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Direksi & Dewan Komisaris Menurut UU PT No. 40 Thn 2007*. Niaga Swadaya.

Widjaja, G. (2008). *Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris Pt: Piercing The Corporate Veil: Memberlakukan Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Direksi & Dewan Komisaris Menurut UU PT No. 40 Thn 2007*. Niaga Swadaya.

Lain-lain

Ais, C. (2001). Fiduciary Duty Sebagai Standar Para Direksi Dalam Melaksanakan Tugasnya. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*.

Aji, W. P. (2022). *Transplantasi hukum perseroan perorangan sebagai perseroan terbatas pasca Omnibus Law*. Skripsi Sarjana, Universitas Islam Indonesia.

Akram, M. H., & Fanaro, N. P. (2019). Implementasi Doktrin Business Judgement Rule di Indonesia. *Ganesha Law Review*.

Alfalamy, J. M. H. (2024). *Kajian Yuridis Ultra Vires Dalam Perbuatan Melawan Hukum Direksi Perseroan Terbatas* (Disertasi, UPN Veteran Jawa Timur).

Anisatur Rohmah & Ahmad Musadad. (2023). Konsep Business Judgement Rule Dalam Perspektif Masalah Mursalah. *Nukhbatul 'Ulum*.

Arifardhani, Y. (2019). Kemandirian BUMN: Persinggungan Hukum Privat & Publik. *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's*.

Ashari, M. H. (2022). Konsekuensi Perpajakan CV Menjadi PT. *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.

Ashraf, Z. (2001). *The Position Of The Business Judgment Rule In Different Corporate Cultures And Structures* (Tesis, McGill University).

Atmadja, D. Y. S. (2023). *Analisis Yuridis Kepailitan BUMN* (Disertasi, Universitas Gadjah Mada).

- Fadila, N. H. (2021). *Asas Akuntabilitas Pada Fiduciary Duty Direksi Dalam Pengelolaan BUMN* (Disertasi, Universitas Jambi).
- Fath, R. A. R., et al. (2022). Pertanggungjawaban perdata atas pendirian perseroan perseorangan. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*.
- Frans Affandhi, dkk. (2016). Business Judgement Rule dan Tindak Pidana Korupsi Direksi BUMN. *USU Law Journal*.
- Frederica, T. S. (2022). *Konsekuensi Yuridis Penambahan Ketentuan Batas Minimum Utang Pada Kepailitan* (Disertasi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Gaol, S. L. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Business Judgement Rule* (Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung).
- Hakim Pengadilan Niaga di Negeri Surabaya. Hasil Wawancara Pribadi: 18 Maret 2025, pukul 09.00 WIB.
- Handayani, S. (2013). Corporate Governance dan Kinerja Keuangan BUMN. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*.
- Irfani, N. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Irmayanti, D. (2024). *Tindak Pidana Korupsi Direktur Utama BUMN* (Disertasi, Universitas Jember).
- Isfardiyana, S. H. (2017). Business Judgement Rule oleh Direksi. *Jurnal Panorama Hukum*.
- Karin, A. S. (2017). Problematika Status Kekayaan Negara BUMN. *Business Law Review Jurnal Universitas Islam Indonesia*.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 740/KMK 00/1989
- Khair, U. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Bagi Debitor Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(2), 258-271.
- Khair, U. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Bagi Debitor Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(2), 258–271.
- Khairandy, R. (2004). Kendala-Kendala Pendeteksian Praktik Insider Trading Dalam Transaksi Saham Di Bursa Efek. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 11(25), 26-37.

- Khairandy, R. (2004). Kendala-Kendala Pendeteksian Praktik Insider Trading Dalam Transaksi Saham Di Bursa Efek. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 11(25), 26–37.
- Khairandy, R. (2013). Karakter Hukum Perusahaan Perseroan Dan Status Hukum Kekayaan Yang Dimilikinya. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(1), 81–97.
- Khairandy, R. (2013). Karakter Hukum Perusahaan Perseroan Dan Status Hukum Kekayaan Yang Dimilikinya. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(1), 81–97.
- Krisnandayu, A. B. (2020). *Ratio decidendi atas prinsip separate legal entity dalam kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan bentuk persero (Studi Putusan Nomor 142 PK/Pdt.Sus/2011)*. Skripsi, Universitas Brawijaya.
- Krisnandayu, A. B. (2020). Ratio Decidendi atas Prinsip Separate Legal Entity dalam Kepailitan BUMN dengan Bentuk Persero (Studi Putusan Nomor 142 PK/Pdt.Sus/2011). *(Skripsi, Universitas Brawijaya)*.
- Lestari, S. N. (2015). Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia. *Notarius*, 8(2), 302–314.
- Lestari, S. N. (2015). Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia. *Notarius*, 8(2), 302–314.
- Lubis, A. A. (2015). Status Kerugian Bisnis Perseroan Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2(2), 108–137.
- Lubis, A. A. (2015). Status Kerugian Bisnis Perseroan Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2(2), 108–137.
- Mangun, U., Asiesteus, S., & Varida, N. (2017). Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Studi Hukum dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Mantili, R., & Dewi, P. E. T. (2020). Perlindungan Kreditor Konkuren Dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Akses*, 12(2), 97–108.
- Mantili, R., & Dewi, P. E. T. (2020). Perlindungan Kreditor Konkuren Dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Akses*, 12(2), 97–108.
- Mantili, R., & Dewi, P. E. T. (2021). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan. *Jurnal Aktual Justice*, 6(1), 1–19.

- Mantili, R., & Dewi, P. E. T. (2021). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan. *Jurnal Aktual Justice*, 6(1), 1–19.
- Meliala, J. S. (2019). *Perlindungan Direksi Berdasarkan Business Judgement Rule, Terhadap Perseroan Terbatas yang Dinyatakan Pailit*. Disertasi, Universitas Sumatera Utara.
- Meliala, J. S. (2019). Perlindungan Direksi Berdasarkan Business Judgement Rule, Terhadap Perseroan Terbatas yang Dinyatakan Pailit. (*Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara*).
- Mezak, M. H. (2013). Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum. *Law Review*.
- Miru, A. (2007). Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhamad Rizal, T. (2023). *Pertanggungjawaban Dewan Direksi BUMN Akibat Keputusan Bisnis (Business Judgement Rule) Yang Merugikan Keuangan Negara (Studi Putusan: Putusan Mahkamah Agung No: 121 K/Pid. Sus/2020)*. Disertasi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Muhamad Rizal, T. (2023). Pertanggungjawaban Dewan Direksi BUMN Akibat Keputusan Bisnis (Business Judgement Rule) Yang Merugikan Keuangan Negara. (*Studi Putusan: Putusan Mahkamah Agung No: 121 K/Pid. Sus/2020*) (Doctoral Dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Muhammad, A. (2010). Hukum Perusahaan Indonesia (Cet. 4). Citra Aditya Bakti., Hlm. 171.
- Mulhadi. (2021). Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha Indonesia. Rajawali Press, Jakarta.
- Munir Fuady. (2014). *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum*. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, H. 186.
- Nadapdap, B. (2019). Hukum Perseroan Terbatas, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Nugra, J. M. (2018). *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Pailit Oleh Pekerja PT. Merpati Nusantara Airlines (Studi Putusan No. 04/Pdt. Sus-Pailit/2016/Pn. Jkt. Pst)*. Disertasi, Universitas Brawijaya.
- Nugra, J. M. (2018). Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Pailit Oleh Pekerja PT. Merpati Nusantara Airlines (Studi Putusan No.

04/Pdt. Sus-Pailit/2016/Pn. Jkt. Pst). (*Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya*).

Nugroho, S. A., & Sh, M. H. (2018). Hukum Kepailitan di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya. Kencana.

Pangeran, F. P. (2018). *Tinjauan Yuridis Perbedaan Penafsiran Pasal 2 Ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU Atas Permohonan Kepailitan Dan PKPU Terhadap BUMN (Studi Kasus PT. Merpati Nusantara Airlines)*. Disertasi, Universitas Brawijaya.

Pangeran, F. P. (2018). *Tinjauan Yuridis Perbedaan Penafsiran Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU Atas Permohonan Kepailitan Dan PKPU Terhadap BUMN (Studi Kasus Pt. Merpati Nusantara Airlines)*. (*Doctoral Dissertation, Universitas Brawijaya*).

Pangestu, M. T., Ilmar, A., & Sitorus, W. (2021). Pengaturan Kekayaan Negara Dalam Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(5), 1324-1334.

Pangestu, M. T., Ilmar, A., & Sitorus, W. (2021). Pengaturan Kekayaan Negara Dalam Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(5), 1324–1334.

Panjaitan, R., Anggusti, M., & Nababan, R. (2021). Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Terhadap Direksi Yang Melakukan Kebijakan Yang Merugikan Perusahaan. *Jurnal Hukum PATIK*, 10(1), 1-14.

Panjaitan, R., Anggusti, M., & Nababan, R. (2021). Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Terhadap Direksi Yang Melakukan Kebijakan Yang Merugikan Perusahaan. *Jurnal Hukum PATIK*, 10(1), 1–14.

Pattikawa, V. (2022). *Penerapan Prinsip Fiduciary Duty Terhadap Kewajiban Direksi 'Perseroan Terbatas' Melaksanakan Laporan Tahunan*. Disertasi, Universitas Kristen Indonesia.

Pattikawa, V. (2022). Penerapan Prinsip Fiduciary Duty Terhadap Kewajiban Direksi 'Perseroan Terbatas' Melaksanakan Laporan Tahunan. (*Doctoral Dissertation, Universitas Kristen Indonesia*).

Prasetio, A., & SH, M. (2014). DILEMA BUMN: Benturan Penerapan Business Judgment Rule (BJR) dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN. PT. Rayyana Komunikasindo.

Prasetya, R. (1995). Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dengan Ulasan Menurut UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Citra Aditya Bakti. Hlm. 13.

- Prayoko, R. (2015). *Doktrin Business Judgement Rule Aplikasinya Dalam Hukum Perusahaan Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Priyono, E., Surono, A., & Sadino, S. (2022). Doktrin Business Judgment Rule Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Direksi BUMN (Studi Kasus PT. PLN). *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 7(2), 29–43.
- Purwaka, T. H. (2011). Penafsiran, Penalaran, dan Argumentasi Hukum yang Rasional. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(2), 117–122.
- Putri, A. J. E. (2021). Penerapan Konsep Business Judgement Rule Pada PT Pertamina Hulu Energi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121 K/Pid. Sus/2020). (*Doctoral Dissertation, Universitas Bhayangkara*).
- Putri, R. P., & Prasetyawati, E. (2023). Urgensi Pengaturan Prinsip Minimal Utang Sebagai Syarat Kepailitan Bagi Debitor. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 507–517.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 417 K/Pid.Sus/2014.
- Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN. Niaga. Jkt.Pst, hlm 33.
- Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby.
- Putusan nomor 5/Pdt.sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga Sby.
- Putusan Nomor 5/Pdt.sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga Sby.
- Rajagukguk, Erman. (2008). *Peranan Hukum dalam Mendorong BUMN Meningkatkan Pendapatan Negara dan Kesejahteraan Rakyat*. Materi pada pertemuan dengan tema “Peranan BUMN dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Negara,” diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 28 Juli.
- Rissy, Y. Y. W. (2020). Ketentuan dan Pelaksanaan Business Judgement Rule di Amerika, Australia dan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(2), 160–171.
- Rissy, Y. Y. W. (2020). Ketentuan Dan Pelaksanaan Business Judgement Rule Di Amerika, Australia Dan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(2), 160–171. Hal 162.
- Salenda, K. (2022). Penerapan Prinsip Business Judgment Rule (BJR) Terhadap Putusan Direksi Perusahaan Perseroan Terbatas. *Alauddin Law Development Journal*, 4(3), 503–519.

- Sandi, M. Y., Muhjad, M. H., & Syaafi, A. (2023). Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Bentuk Persero. *Notary Law Journal*, 2(3), 181–202.
- Santoso, D. P. (2005). *Tanggung Gugat Direksi Sehubungan Dengan Kepailitan Perseroan Terbatas. (Doctoral Dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).*
- Saputra, D. P., Maryono, M., & Fitriani, A. (2023). Kepailitan Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Merpati Nusantara Airline. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(10), 3345–3366.
- Saputra, I. E. (2020). Kedudukan Hukum
- Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 101-113.
- Supriyatin, U., & Herlina, N. (2020). Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 8(1), 127-144.
- Syabrina, E.D. (2023). Perlindungan hukum terhadap pemberhentian sepihak direksi berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. *(Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).*
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.
- Wardani, D. S. (2023). Perlindungan Direksi Terhadap Keputusan Bisnis Melalui Penerapan Prinsip Business Judgement Rules Di Amerika Serikat, Jepang, Dan Indonesia. *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum Fhui*, 2(3), 8.
- Wardhana, G. P. (2019). Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Atas Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Perseroan. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 14(1), 59-60.
- Wiranti, W. (2022). Tanggung Jawab Pengurus Perseroan Atas Tunggalan Pajak Perseroan Berdasarkan Prinsip Fiduciary Duty. *Amnesti Jurnal Hukum*, 4, 156-169.
- Yonas, S., Raharjo, A., & Budiyo, B. (2021). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Pada PT. Merpati Nusantara Airlines). *Soedirman Law Review*, 3(2).

Yunus, N. R., & Nasution, L. (2021). Transformasi Dan Pengawasan Keuangan Negara Pada Bumh Dengan Prinsip Business Judgment Rule. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(2), 192-203.

Zein, D. I. (2021). Implementasi Business Judgement Rule Pada Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Prinsip Akuntabilitas Studi Kasus Pt Pertamina (Persero) Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid. Sus/2020. (*Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*).

Zulfikar, R. N. (2021). Business Judgement Rule Kaitannya Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Direksi Dalam Pengelolaan Investasi Bumh (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid. Sus/2020).